

PENGARUH KETERSEDIAAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

MAIZUL RAHMIZAL
1103446/2011

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

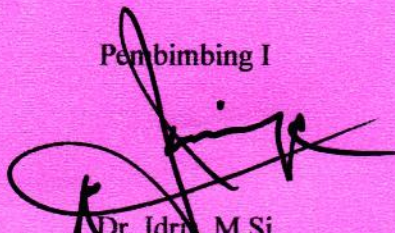
**PENGARUH KETERSEDIAAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP
KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA**

Nama : Maizul Rahmizal
NIM/TM : 1103446/2011
Keahlian : Publik
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2015

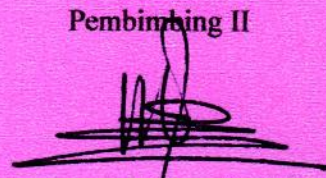
DISETUJUI OLEH:

Pembimbing I



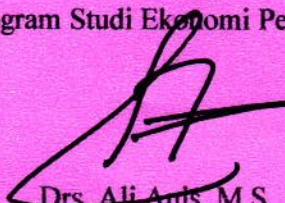
Dr. Idris M.Si
NIP: 19610703 198503 1 001

Pembimbing II



Muhammad Irfan, SE, M.Si
NIP: 19770409 200312 1 002

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan



Drs. Ali Anis, M.S
NIP: 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

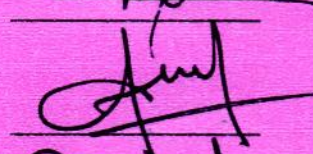
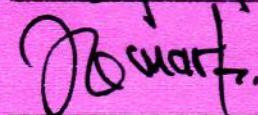
*Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

PENGARUH KETERSEDIAAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA

Nama : Maizul Rahmizal
NIM/TM : 1103446/2011
Keahlian : Publik
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2015

Tim Penguji:

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Idris, M.Si	
2. Sekretaris	: Muhammad Irfan, SE, M.Si .	
3. Anggota	: Ariusni, SE, M.Si .	
4. Anggota	: Joan Marta, SE, M.Si	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maizul Rahmizal
NIM/Thn. Masuk : 1103446 / 2011
Tempat/Tgl Lahir : Sungai Padi/ 29 Mei 1992
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Polonia, Gang Blang Bintang No. 17, ATT
No. HP/telp : 085274034598
Judul Skripsi : PENGARUH KETERSEDIAAN SUMBER DAYA ALAM
TERHADAP KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/ skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Negeri Padang maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah, dengan cara menyebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/ skripsi ini sah apabila telah ditandatangani **Asli** oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/ skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Agustus 2015

Yang menyatakan,



Maizul Rahmizal

1103446/2011

ABSTRAK

Maizul Rahmizal (1103446/2011): Pengaruh Ketersediaan Sumber Daya Alam terhadap Kualitas Pembangunan Manusia ‘Pengujian Hipotesis Kutukan Sumber Daya Alam (*Resource Curse*) di Indonesia’. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di Bawah Bimbingan Bapak Dr. Idris, M.Si dan Bapak Muhammad Irfan, SE, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh ketersediaan SDA yang diukur dengan persentase SDA sektor pertanian dan persentase SDA sektor Pertambangan dan penggalian terhadap PDRB terhadap Kualitas pembangunan manusia dengan menggunakan Indikator rata-rata lama sekolah dan Angka partisipasi murni untuk indikator pendidikan dan angka harapan hidup angka keluhan kesehatan untuk indikator kesehatan.

Jenis penelitian ini deskriptif dan asosiatif, yaitu penelitian yang mendeskriptifkan variabel penelitian dan menemukan ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jenis data dalam penelitian ini adalah data Cross Section kabupaten/kota di Indonesia tahun 2013 dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan induktif yaitu: uji prasyarat (multikolinearitas dan heterokedastisitas), analisis regresi berganda dan uji t.

Hasil penelitian : (1) Persentase Sektor SDA pertanian terhadap PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Rata-rata Lama Sekolah di Indonesia, dengan besaran pengaruhnya 0,05 (2) Persentase Sektor SDA pertambangan dan penggalian terhadap PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Rata-rata Lama Sekolah di Indonesia, dengan besaran pengaruhnya 0,01 (3) Persentase Sektor SDA pertanian terhadap PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni di Indonesia, dengan besaran pengaruhnya 0,34 (4) Persentase Sektor SDA pertambangan dan penggalian terhadap PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni di Indonesia ($\text{level prob} = 0,2987 > \alpha = 0,05$) (5) Persentase Sektor SDA pertanian terhadap PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Angka Harapan Hidup di Indonesia, besaran pengaruhnya 0,06 (6) Persentase Sektor SDA pertambangan dan penggalian terhadap PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Angka Harapan Hidup di Indonesia, besaran pengaruhnya 0,01

Dari hasil penelitian disarankan (1) modal sosial perlu ditingkatkan untuk menunjang kemajuan suatu negara (2) peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas (3) pemerataan peningkatan Infrastruktur di setiap daerah (4) pemerintah harus mentata alur birokrasi dan suasana demokratisasi yang baik dan bersih.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Ketersediaan Sumber Daya Alam Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Idris, M.Si dan Bapak Muhammad Irfan, SE, M.Si selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, saran dan waktu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Idris, M.Si Bapak Muhammad Irfan, SE, M.Si Ibuk Ariusni, SE, M.Si, Bapak Joan Marta, SE, M.Si selaku Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran – saran beserta masukan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Ali Anis, M.S selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, dan Ibuk Novya Zulva Riyani, SE, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi UNP yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.

4. Bapak Doni Satria, SE, M.Si dan Novya Zulva Riyani, SE, M.Si, selaku Pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan selama menempuh pendidikan di FE UNP.
5. Dosen serta Staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat beserta Staf yang telah membantu kelancaran bagi penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
7. Teristimewa penulis persembahkan untuk Ibunda dan Ayahanda (Erman St.Sinaro dan Marlini) yang telah memberikan kesungguhan do'a, yang senantiasa mendidik dan membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang.
8. Rekan – rekan seperjuangan Ekonomi Pembangunan angkatan 2011, keluarga besar FORMI MADANI FE UNP, BIDIK MISI FE UNP, dan PUSKOMDA FSLDK SUMBAR, serta semua pihak yang telah membantu.

Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari, walaupun sudah berusaha maksimal namun masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis mohon maaf dan selalu mengharapkan informasi baik saran maupun kritik dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata dengan keterbatasan dan kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Padang, Agustus 2015

Penulis,

Maizul Rahmizal

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	18
A. Kajian teori	18
1. Konsep Pembangunan Manusia dan Pengukurannya.....	18
a. Pendidikan	22
b. Kesehatan.....	25
2. Sumber Daya Alam	28
a. Sumber Daya Alam Sebagai Barang Publik	28
b. Peranan Pemerintah dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam.	30
c. Sumbangan Sumber Daya Alam Terhadap Pendapatan	33
3. Pengeluaran Publik Untuk Pendidikan dan Kesehatan	34
a. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan	34

b. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan	35
4. Peranan Sumber Daya Alam terhadap Pembangunan Manusia	36
a. Teori Klasik	36
b. Dasar Pemikiran Hotelling.....	37
5. Natural Resources Curse (Kutukan Sumber Daya Alam)	39
a. Penyebab Kutukan sumber daya alam	42
B. Penelitian Sejenis	45
C. Kerangka Konseptual	49
D. Hipotesis.....	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Tempat dan Waktu Penelitian	53
C. Jenis Data	53
D. Variabel Penelitian	54
E. Teknik Pengumpulan Data	54
G. Model Analisis Data.....	55
H. Teknik Analisis Data	58
1) Analisis Deskriptif.....	58
2) Analisis Induktif	60
a. Uji Asumsi Klasik.....	60
1) Uji Multikolinieritas.....	60
2) Uji Heterokedastisitas	61
b. Koefisien determinasi (Adjusted R ²)	61
c. Pengujian hipotesis	62
Uji t (Parsial)	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Hasil Penelitian	63
1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	63

a. Pembangunan Manusia di Indonesia.	63
b. Sumber Daya Alam di Indonesia.	73
2. Analisis Induktif	75
a. Analisis Regresi Linier Berganda	75
b. Uji Prasyarat Analisis	82
1) Hasil Uji Multikolinieritas	82
2) Uji Heterokedastisitas	83
c. Hasil Uji Hipotesis.....	84
B. Pembahasan	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	105
A. KESIMPULAN	105
B. SARAN	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. IPM Negara ASEAN	2
2. Indek Pembangunan manusia Provinsi di Indonesia	5
3. Angka Harapan Hidup, Keluhan kesehatan, Rata-rata Lama Sekolah, dan Angka Partisipasi Murni.	7
4. Persentase sektor Pertanian dan sektor pertambangan dan penggalan terhadap PDRB tahun 2013	10
5. Penelitian sejenis	45
6. Nilai deskriptif variabel indikator pendidikan dan kesehatan	72
7. Nilai deskriptif variabel Sumber daya alam	74
8. Hasil Estimasi Regresi Rata-rata lama sekolah	76
9. Hasil Estimasi Regresi Angka partisipasi murni	77
10. Hasil Estimasi Regresi Angka harapan hidup	79
11. Hasil Estimasi Regresi Angka keluhan kesehatan	81
12. Hasil Uji Multikolinieritas menggunakan nilai VIF	82
13. Hasil Uji Heterokedastisitas	83
14. Nilai Penduga Koefisien Regresi Rata-rata lama sekolah	85
15. Nilai Penduga Koefisien Regresi angka partisipasi murni	86
16. Nilai Penduga Koefisien Regresi Angka harapan hidup	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambaran Angka Harapan Hidup di Provinsi-Provinsi Indonesia tahun 2013	64
2. Angka Keluhan Kesehatan di Provinsi-provinsi Indonesia tahun 2013	68
3. Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2013	69
4. Angka Partisipasi Murni Provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2013	70
5. Besaran persentase sumbangan sumber daya alam pertanian dan Pertambangan terhadap PDRB Provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2013 ...	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Hasil Regresi Linier Berganda	111
2. Miltikolineartas	112
3. T- Tabel	113
4. Data Sumber Daya Alam Dan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2013	114

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya, oleh sebab itu tujuan utama dari pembangunan Indonesia adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sumberdaya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari angka pendidikan dan kesehatan, serta perekonomian suatu wilayah atau negara yang semakin membaik. Oleh karena itu, sebagian besar negara, baik negara maju maupun negara berkembang banyak yang menggunakan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator untuk menilai kualitas sumberdaya manusia.

Sebagaimana dinyatakan didalam Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Diantara pilihan-pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah pilihan untuk hidup sehat dan berumur panjang, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut United Nations Development Programme (UNDP) telah menetapkan standar pengukuran pembangunan sumber daya manusia yang dituangkan kedalam Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sehingga saat ini setiap negara berlomba-lomba menciptakan masyarakat yang berkualitas. Pencapaian indikator-indikator pembangunan manusia negara-negara ASEAN pada tahun 2012 dan 2013 terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. IPM Negara ASEAN

No	Negara	Tahun 2012		Tahun 2013	
		Angka	Peringkat Negara	Angka	Peringkat Negara
1	Singapura	0,899	12	0,901	9
2	Brunei	0,852	30	0,852	30
3	Malaysia	0,773	64	0,773	62
4	Thailand	0,720	89	0,722	89
5	Indonesia	0,681	108	0,684	108
6	Filiphina	0,656	117	0,660	117
7	Vietnam	0,635	121	0,638	121
8	Kamboja	0,579	137	0,584	136
9	Laos	0,565	139	0,569	139
10	Myanmar	0,520	149	0,524	150

Sumber : HDR 2014, UNDP

Dari tabel 1 terlihat pada tahun 2012 dan 2013, menurut laporan dari UNDP dalam Human Development Report (HDR) Indonesia menempati urutan 108 diantara 187 negara dengan Angka 0,681 pada tahun 2012 dan 0,684 pada tahun 2013 di seluruh dunia yang disurvei. Hasil capaian tersebut tentu saja lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, antara lain: Singapura

(urutan 9), Brunei (urutan 30), Malaysia (urutan 62) yang mengalami peningkatan peringkat dari tahun 2012 (urutan 64), dan Thailand (urutan 89). Hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan pembangunan yang terfokus pada kualitas human capital atau sumber daya manusia, sehingga Indonesia bisa mengejar ketertinggalan terhadap negara-negara lainnya, khususnya di lingkup asia tenggara.

Pembangunan manusia dapat tercapai apabila ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai peran yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Peran serta pemerintah sangat diperlukan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk sebagai sumber daya baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek inteletualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (pendapatan) serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan) (Azahari, 2000: 57 dalam Siletty, 2012).

Di Indonesia dengan diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, menyebabkan terjadinya perubahan sistem desentralisasi di Indonesia. Peran pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal ini disatu sisi merupakan berkat, namun disisi lain sekaligus merupakan beban yang pada saatnya nanti akan menuntut kesiapan daerah untuk dapat melaksanakannya. Dengan adanya perubahan sistem tersebut maka beberapa aspek harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah, antara

lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, serta organisasi dan manajemennya (Darumurti et.al., 2003).

Kemampuan daerah dalam mengolah sumber daya yang dimiliki dapat dijadikan sebagai sumber kekayaan bagi daerah. Pengelolaan daerah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan dapat merangsang perkembangan kegiatan ekonomi, dan dapat menambah pendapatan bagi daerah. Daerah otonom dapat memiliki pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya secara efektif dan efisien dengan memberikan pelayanan dan pembangunan. Tujuan pemberian otonomi daerah tidak lain adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah (Sidik et.al., 2002). Visi otonomi dari sudut pandang ekonomi mempunyai tujuan akhir untuk membawa masyarakat ketingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu (Syaukani et.al., 2005).

Dengan adanya Otonomi daerah ini maka kita dapat melihat apakah tujuan utama dari pembangunan yang ingin dicapai yaitu kesejahteraan masyarakat telah terpenuhi. Untuk melihat capaian tujuan tersebut kita dapat melihat dari Indeks pembangunan manusia sebagai tolak ukur untuk mengetahui capaian kinerja dari masing-masing daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan perbandingannya dengan daerah-daerah lainnya.

Tabel 2. Indek Pembangunan Manusia Provinsi Indonesia

Propinsi	Tahun 2012		Tahun 2013	
	Indek	Renking	Indek	Renking
Aceh	72,51	19	73,00	19
Sumatera Utara	75,13	8	75,55	8
Sumatera Barat	74,70	9	75,01	9
Riau	76,90	3	77,25	5
Jambi	73,78	12	74,35	12
Sumatera Selatan	73,99	10	74,36	11
Bengkulu	73,93	11	74,41	10
Lampung	72,45	20	72,87	20
Kepulauan Bangka Belitung	73,78	13	74,29	13
Kepulauan Riau	76,2	6	76,56	6
DKI Jakarta	78,33	1	78,59	1
Jawa Barat	73,11	16	73,58	16
Jawa Tengah	73,36	15	74,05	15
Yogyakarta	76,75	4	77,37	2
Jawa Timur	72,83	17	73,54	17
Banten	71,49	23	71,90	23
Bali	73,49	14	74,11	14
Nusa Tenggara Barat	66,89	32	67,73	32
Nusa Tenggara Timur	68,28	31	68,77	31
Kalimantan Barat	70,31	28	70,93	28
Kalimantan Tengah	75,46	7	75,68	7
Kalimantan Selatan	71,08	25	71,74	25
Kalimantan Timur	76,71	5	77,33	4
Sulawesi Utara	76,95	2	77,36	3
Sulawesi Tengah	72,14	22	72,54	22
Sulawesi Selatan	72,70	18	73,28	18
Sulawesi Tenggara	71,05	26	71,73	26
Gorontalo	71,31	24	71,77	24
Sulawesi Barat	70,73	27	71,41	27
Maluku	72,42	21	72,70	21
Maluku Utara	69,98	30	70,63	29
Papua Barat	70,22	29	70,62	30
Papua	65,86	33	66,25	33

Sumber : Badan Pusat Statistik. 2014

Dari tabel 2 menggambarkan kondisi pembangunan manusia di provinsi-provinsi diseluruh Indonesia dapat kita amati bahwa IPM provinsi di Indonesia masih mengalami kertimpangan pembangunan, bahwa Indonesia bagian timur seperti pulau Papua dan Maluku masih jauh tertinggal apabila kita bandingkan dengan daerah Indonesia bagian barat mencakup pulau Sumatera dan Jawa. Hal ini dapat di lihat bahwa provinsi yang nilai IPM masih rendah seperti Provinsi Papua, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua Barat, Maluku Utara yang merupakan daerah bagian Timur Indonesia yang menjadi provinsi dengan tingkat IPM terendah dari keseluruhan provinsi yang ada di Indonsia. Hal ini disebabkan faktor kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah-daerah tersebut sehingga mengakibatkan rendahnya perhatian dan kesadaran dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pengembangan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut apabila dibandingkan dengan daerah-daerah Indonesia bagian barat.

Untuk melihat lebih dalam kesejahteraan masyarakat kita dapat menggunakan indikator pendidikan dan indikator kesehatan untuk melihat sejauhmana kesejahteraan tersebut dapat dipenuhi oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang telah di keluarkan melalui anggaran yang dikeluarkan untuk belanja Publik. Aghio, Caroli, dan Garcia Panolasa (1999) menegaskan bahwa Pendidikan menciptakan Kondisi yang lebih baik untuk pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kesehatan dan meningkatkan kesetaraan.

Tabel 3. Angka Harapan Hidup, Keluhan kesehatan, Rata-rata Lama Sekolah, dan Angka Partisipasi Murni.

No	PROPINSI	2013			
		AHH (Tahun)	Keluhan kesehatan (Persen)	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	Angka Partisipasi Murni (Persen)
1	ACEH	69,40	52.68	9,02	63.43
2	SUMATERA UTARA	69,90	52.09	9,13	62.19
3	SUMATERA BARAT	70,09	52.20	8,63	61.00
4	RIAU	71,73	59.15	8,78	58.74
5	JAMBI	69,61	69.32	8,32	52.13
6	SUMATERA SELATAN	70,10	68.61	8,04	51.67
7	BENGKULU	70,44	72.49	8,55	60.32
8	LAMPUNG	70,09	69.70	7,89	53.48
9	KEP. BANGKA BELITUNG	69,46	70.01	7,73	50.80
10	KEPULAUAN RIAU	69,97	50.50	9,91	67.62
11	DKI JAKARTA	73,56	57.59	11,00	55.40
12	JAWA BARAT	68,84	66.05	8,11	52.25
13	JAWA TENGAH	71,97	64.87	7,43	51.81
14	D I YOGYAKARTA	73,62	63.25	9,33	64.86
15	JAWA TIMUR	70,37	66.48	7,53	53.30
16	BANTEN	65,47	62.75	8,61	53.28
17	BALI	71,20	62.99	8,58	67.04
18	NUSA TENGGARA BARAT	63,21	60.42	7,20	58.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	68,05	44.08	7,16	47.30
20	KALIMANTAN BARAT	67,40	68.05	7,17	44.79
21	KALIMANTAN TENGAH	71,47	73.85	8,17	45.43
22	KALIMANTAN SELATAN	64,82	70.00	8,01	50.05
23	KALIMANTAN TIMUR	71,78	63.69	9,39	62.91
24	SULAWESI UTARA	72,62	66.19	9,09	57.26
25	SULAWESI TENGAH	67,21	61.95	8,22	58.38
26	SULAWESI SELATAN	70,60	52.69	8,01	54.26
27	SULAWESI TENGGARA	68,56	54.98	8,44	55.50
28	GORONTALO	67,54	67.16	7,52	48.91
29	SULAWESI BARAT	68,34	49.21	7,35	52.22
30	MALUKU	67,88	40.46	9,20	55.59
31	MALUKU UTARA	66,97	54.25	8,72	59.54
32	PAPUA BARAT	69,14	43.94	8,53	53.80
33	PAPUA	69,13	24.57	6,87	36.73

Sumber : Badan Pusat Statistik. 2014

Dari tabel 3 kita perhatikan dari Indikator yang digunakan yaitu angka harapan hidup dan angka keluhan kesehatan untuk indikator kesehatan, rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi murni untuk indikator pendidikan. Pada indikator kesehatan angka harapan hidup provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan daerah dengan angka harapan hidup yang paling rendah dengan 63,21 tahun dan hal ini menandakan bahwa daerah tersebut merupakan daerah dengan kurangnya pelayanan kesehatan di daerah. Untuk angka keluhan kesehatan provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah dengan angka keluhan kesehatan yang tertinggi dengan angka 73,85 persen. Untuk indikator pendidikan rata-rata lama dan angka partisipasi murni provinsi Papua dengan tingkat yang paling rendah hal ini terlihat bahwa angka rata-rata lama sekolah pada angka 6,87 tahun dan 36,73 persen pada angka partisipasi murni.

Dari kedua data yang digunakan untuk melihat kualitas Pembangunan Manusia baik IPM dan indikator pendidikan dan kesehatan yang digunakan tersebut lebih dalam lagi apabila kita perhatikan bahwa daerah-daerah yang memiliki IPM dan Indikator pendidikan dan kesehatan yang relatif rendah sebenarnya memiliki kekayaan Sumber daya alam yang melimpah. Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada saat sekarang ini seharusnya memberikan keuntungan bagi daerah-daerah yang kaya sumber daya alam untuk mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, karena seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah daerah memperoleh proporsi dana bagi hasil sumber daya alam yang lebih besar dibanding dengan yang diatur melalui ketentuan perundang-undangan, seperti yang ditegaskan dalam pasal 10 Undang undang No. 22 tahun 1999, pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya alam nasional yang tersedia di daerahnya.

Gylfason (2001) Menunjukkan bahwa pengeluaran publik untuk pendidikan relatif pada pendapatan nasional. Hal ini menandakan bahwa keberlimpahan sumber daya alam seharusnya memberikan dampak yang positif terhadap pendidikan dan kesehatan yang nantinya akan terlihat dari indek pembangunan manusianya karena keberlimpahan sumber daya alam akan memberikan porsi pendapatan yang lebih besar dari sumber daya alam dan dapat disalurkan untuk kesejahteraan pada masyarakat melalau pengeluaran publik pada anggaran belanja untuk pembangunan manusia pada pendidikan dan kesehatan.

Besarnya pengeluaran publik yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah tersebut, besarnya pendapatan daerah ditantukan oleh sumber-sumber pendapatan salah satunya adalah dari kekayaan sumber daya alam. Besarnya sumbangan sumber daya alam terhadap pendapatan daerah tersebut dapat kita lihat dari persentase dari sektor-sektor yang disediakan alam yaitu sektor pertanian dan sektor Pertambang dan penggalian terhadap PDRB daerah tersebut.

Tabel 4. Persentase sektor Pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB tahun 2013

No	PROPINSI	2013		
		Pertanian (%)	Pertambangan & Penggalian (%)	Total (%)
1	ACEH	26.87	6.66	33.53
2	SUMATERA UTARA	22.46	1.13	23.59
3	SUMATERA BARAT	22.03	2.85	24.88
4	RIAU	17.11	43.65	60.76
5	JAMBI	29.34	12.54	41.88
6	SUMATERA SELATAN	18.99	19.46	38.45
7	BENGKULU	36.38	3.37	39.75
8	LAMPUNG	36.61	2.03	38.63
9	KEP. BANGKA BELITUNG	23.50	12.32	35.82
10	KEPULAUAN RIAU	3.91	4.70	8.61
11	DKI JAKARTA	0.07	0.20	0.27
12	JAWA BARAT	11.19	1.69	12.88
13	JAWA TENGAH	16.81	1.12	17.94
14	D I YOGYAKARTA	15.18	0.68	15.87
15	JAWA TIMUR	13.19	2.07	15.27
16	BANTEN	7.31	0.10	7.41
17	BALI	17.70	0.75	18.45
18	NUSA TENGGARA BARAT	25.39	15.46	40.85
19	NUSA TENGGARA TIMUR	34.18	1.34	35.51
20	KALIMANTAN BARAT	24.49	1.76	26.24
21	KALIMANTAN TENGAH	27.99	11.55	39.54
22	KALIMANTAN SELATAN	22.24	20.79	43.03
23	KALIMANTAN TIMUR	7.10	42.00	49.10
24	SULAWESI UTARA	17.15	4.84	21.99
25	SULAWESI TENGAH	36.66	8.18	44.84
26	SULAWESI SELATAN	25.12	7.29	32.41
27	SULAWESI TENGGARA	26.88	9.29	36.17
28	GORONTALO	27.17	1.10	28.27
29	SULAWESI BARAT	44.71	1.00	45.71
30	MALUKU	29.70	0.76	30.46
31	MALUKU UTARA	31.81	3.69	35.50
32	PAPUA BARAT	14.27	8.11	22.38
33	PAPUA	17.38	32.05	49.43

Sumber: Badan Pusat Statistik 2014

Dari tabel 4 menggambarkan Sumbangan Sektor sumber daya alam terhadap PDRB, sumbangan sumber daya alam terhadap PDRB dapat dilihat dari sektor Pertanian dan sektor penggalian dan pertambangan.

Secara keseluruhan bahwa potensi sumber daya alam Indonesia sangat besar, walaupun keberadaanya tidaklah merata di setiap daerah. Dapat kita lihat di beberapa daerah memiliki ketersediaan sumber daya alam sangat besar. Beberapa daerah yang pendapatannya didominasi oleh sektor pertanian seperti daerah Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara dimana persentasenya sumbangan sektor pertaniannya melebihi dari 30% dari PDRB daerah tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa daerah-daerah tersebut sektor pertanian menjadi sektor utama dari pendapatan daerah tersebut.

Pada sektor pertambangan dan penggalian dapat dilihat bahwa daerah seperti Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua merupakan daerah-daerah dengan sektor pertambangan dan penggalian memberikan pengaruh sangat besar terhadap pendapatan Daerah tersebut. Dapat di lihat pengaruh sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB mencapai 32,05% pada daerah Papua, 43,65% di Riau dan 42,00% di daerah Kalimantan Timur.

Secara keseluruhan beberapa daerah besarnya persentase pengaruh sumber daya alam terhadap PDRB daerahnya hampir mencapai sertengah atau melebihi 50% dari PDRB daerah tersebut hal ini menunjukkan bahwa sumber daya alam

menjadi Pendapatan utama dari daerah-daerah tersebut seperti Riau yang mencapai 60,76 %, Papua sebesar 49,43%, dan Kalimantan Timur 49,10%.

Secara keseluruhan hampir semua daerah di Indonesia sumbangan sektor sumber daya alam melebihi dari 25% dari PDRB daerah tersebut hal ini menggambarkan masih tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap sumber daya alam walaupun ada daerah sumbangan sektor daya alamnya relatif rendah dikarenakan sumbangan sektor-sektor lain lebih mendominasi terhadap PRDB daerah tersebut.

Apabila kita kaitkan daerah dengan kekayaan sumber daya alam yang besar seperti Papua, Kalimantan Timur, dan Riau dengan pencapaian tujuan utama pembangunan sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya dapat kita lihat dari rangking Indek Pembangunan Manusia (IPM) daerah masing-masingnya. Papua dengan kekayaan sumber daya alam yang besar namun kita lihat dari rangking IPM menempati posisi terakhir dengan angka 66,25 pada tahun 2013. Bila kita lihat dari daerah lainnya yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar seperti Riau tidak terjadi permasalahan dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya pada indek pembangunan manusianya yang cukup baik dengan menempati rangking kelima dengan angka 77,25 pada tahun yang sama. Akan tetapi apabila kita lihat lebih dalam lagi daerah-daerah yang persentase sumbangan sektor sumber daya alamnya yang relative besar terhadap PDRB seperti Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara memiliki indek pembangunan manusianya juga relative lebih

rendah di bandingkan dengan daerah lain yang persentase sumbangan sumber daya alamnya terhadap PDRB daerah-daerah tersebut justru termasuk daerah dengan 10 indek pembangunan manusia terendah dari semua daerah yang ada di Indonesia.

Fenomena yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia menjadi fenomena menarik bahwa kekayaan akan sumber daya alam tidak memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat daerah tersebut, hal yang terjadi justru sebaliknya bahwa kelimpahan sumber daya alam mengakibatkan keterbelakangan dan kemiskinan. Hal ini tidak sesuai dengan yang pernah di kemukakan oleh Wright dan Czelusta (2004) yang menyatakan bahwa keberhasilan perekonomian Amerika melampaui Inggris di abad 18 disebabkan karena Amerika memiliki berkah sumber daya alam yang lebih melimpah dibanding Inggris. Temuan lainnya penelitian Devis (1995) dalam makalahnya tentang keberlimpahan sumber daya dan pertumbuhan ekonomi menemukan indikator akumulasi modal manusia lebih tinggi di negara-negara kaya akan mineral dibandingkan dengan negara keterbatasan ketersediaan mineral.

Hal ini mengisyaratkan bahwa negara yang kaya akan sumber daya alam akan memiliki pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dibandingkan dengan Negara yang memiliki keterbatasan sumber daya alam.

Akan tetapi negara yang memiliki kelimpahan sumber daya alam kecendrungan memiliki indek pembangunan manusia yang rendah, hal ini di

ceritakan dalam buku “*escaping the resources curse*” dimana Negara kaya sumber daya alam seperti Gabon, Kongo, Nigeria, Angola dan Chad berada pada posisi terbawah dalam human development report yang dikeluarkan PBB. Selain itu juga dijelaskan walaupun beberapa negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki indek pembangunan manusia yang baik, permasalahan kesenjang sosial antar masyarakatnya masih sangat besar.

Negara-negara yang berkelimpahan dengan sumber daya alam seperti minyak dan gas, performa pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahannya (*good governance*) kerap lebih buruk dibandingkan negara-negara yang sumberdaya alamnya lebih kecil. Secara paradoks, meskipun muncul harapan besar akan munculnya kekayaan dan luasnya peluang yang mengiringi temuan dan ekstraksi minyak serta sumberdaya alam lainnya, anugerah seperti itu kerap kali menjadi penghambat daripada menciptakan pembangunan yang stabil dan berkelanjutan.

Di sisi lain, kekurangan sumberdaya alam ternyata belum terbukti menjadi penghalang terhadap kesuksesan ekonomi. Contohnya dari dunia berkembang seperti di Asia negara Hong Kong, Korea, Singapura, dan Taiwan semuanya sukses memiliki industri ekspor yang maju berbasiskan barang-barang manufaktur dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, padahal tidak memiliki cadangan sumberdaya alam besar. Di sisi lain, banyak negara kaya sumberdaya alam justru masih berjuang supaya bisa lepas landas dan mengejar pertumbuhan ekonomi yang mandiri. Bahkan ada di antaranya yang terjerembab ke dalam krisis ekonomi yang parah (Sachs and Warner 1995).

Dari fenomena negara-negara tersebut apabila kita kaitkan dengan Indonesia, maka Indonesia merupakan salah satu negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, karenanya studi mengenai fenomena Kutukan sumber daya dianggap penting untuk dilakukan. Studi kutukan SDA pada level daerah di Indonesia dilakukan oleh Komarulzaman & Alisjahbana (2006). Studi ini menggunakan bagi hasil (sewa) SDA sebagai ukuran kelimpahan SDA, dan menemukan bahwa secara agregat (total seluruh jenis sumber daya alam) kutukan sumber daya alam tidak terbukti eksis untuk kasus Indonesia. Hasil tersebut konsisten dengan studi Rosser (2004). Untuk membuktikan hipotesis kutukan SDA, Komarulzaman & Alisjahbana (2006) menggunakan regresi cross-section. Studi lainnya pada level daerah dilakukan oleh Feryawan (2011). Feryawan (2011) menguji hipotesis kutukan SDA dengan melakukan penarikan sampel untuk mewakili kategori daerah kaya dan daerah miskin SDA, kemudian membandingkan performa indikator-indikator perekonomian pada kedua kelompok sampel tersebut. Hasil yang diperoleh studi tersebut berbeda dengan temuan Komarulzaman & Alisjahbana (2006).

Feryawan (2011) menunjukkan adanya bukti eksistensi kutukan SDA di Indonesia. Feryawan (2011) seperti juga halnya Komarulzaman & Alisjahbana (2006) menguji hipotesis kutukan SDA pada era otonomi daerah, karena isu mengenai kutukan SDA menjadi lebih penting dan relevan untuk dikaji pada era

otonomi daerah, yang memberikan kekuasaan lebih besar bagi daerah untuk memanfaatkan sumber daya alamnya.

Dari penelitian yang telah dilakukan belum ada penelitian yang memfokuskan antara kesediaan sumber daya alam terhadap indikator-indikator pendidikan dan kesehatan yang merupakan indikator utama bagi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, oleh sebab itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “PENGARUH KETERSEDIAAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh ketersediaan sumber daya alam sektor pertanian terhadap pendidikan?
2. Bagaimana pengaruh ketersediaan sumber daya alam sektor pertambangan dan penggalan terhadap pendidikan?
3. Bagaimana pengaruh ketersediaan sumber daya alam sektor pertanian terhadap kesehatan?
4. Bagaimana pengaruh ketersediaan sumber daya alam sektor pertambangan dan penggalan terhadap kesehatan?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang akan di capai adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh ketersediaan sumber daya alam sektor pertanian terhadap pendidikan.
2. Pengaruh ketersediaan sumber daya alam sektor pertambangan dan penggalian terhadap pendidikan.
3. Pengaruh ketersediaan sumber daya alam sektor pertanian terhadap kesehatan.
4. Pengaruh ketersediaan sumber daya alam sektor pertambangan dan penggalian terhadap kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Penulis sendiri, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi (S1) pada program studi ekonomi pembangunan di fakultas ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu ekonomi pembangunan, dan ilmu ekonomi sumber daya alam dan lingkungan serta ilmu tentang sosial Ekonomi.
3. Pengambil kebijakan pada instansi-instansi pemerintah yang terkait, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
4. Peneliti lebih lanjut yang melakukan penelitian yang sejenis, agar melakukan pengembangan lebih dalam dan luas.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian teori

1. Konsep Pembangunan Manusia dan Pengukurannya

Pembangunan manusia merupakan hal yang mutlak dilakukan guna mencetak sumberdaya manusia yang memadai untuk melaksanakan pembangunan. Dengan sumber daya manusia yang baik dan memadai maka pelaksanaan pembangunan akan semakin lancar dalam berbagai sektor.

Dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas SDM. Pemerintah hendaknya memperhatikan hal tersebut terlebih jika memandang manusia merupakan subjek dan objek pembangunan, sehingga pembangunan manusia yang kemudian menunjang pembangunan diberbagai sektor akan mewujudkan kesejahteraan bagi manusia yang berada dalam wilayah pemerintahan tersebut. Pembangunan manusia merupakan hal yang penting terutama bagi sebagian negara khususnya negara yang sedang berkembang hal ini disebabkan oleh karena banyak negara dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi namun gagal dalam menghadapi masalah kesenjangan sosial dan meningkatnya kemiskinan selain itu pembanguan manusia sebenarnya merupakan investasi tidak langsung terhadap pencapaian tujuan perekonomian nasional.

Beberapa kalimat pembuka dari Human Development Report (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh United Nations Development Programmes (UNDP) pada tahun 1990 secara jelas menekankan pesan utama yang dikandung oleh setiap laporan pembangunan manusia baik ditingkat global, nasional maupun tingkat daerah, yaitu pembangunan manusia yang terpusat pada manusia, yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan nasional dan bukan sebagai alat dari pembangunan.

Berbeda dengan konsep pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia. Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan (UNDP, 2004).

Jadi dapat disimpulkan teori pembangunan manusia adalah teori yang memperjelas penting sumberdaya manusia yang berkualitas disamping modal dalam mencapai tujuan pembangunan dan menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan nasional dan bukan sebagai alat dari pembangunan.

Aspek pembangunan manusia ini dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia ini merupakan salah satu alternatif pengukuran pembangunan selain menggunakan Gross Domestic Bruto. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup,

pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak.

Adapun indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi HDI adalah sebagai berikut: (UNDP, Human Development Report 1993: 105-106)

- *Longevity*, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau *life expectancy of birth* dan angka kematian bayi per seribu penduduk atau *infant mortality rate*.
- *Educational Achievement*, diukur dengan dua indikator, yakni melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (*adult literacy rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas (*the mean years of schooling*).
- *Access to resource*, dapat diukur secara makro melalui PDB riil perkapita dengan terminologi *purchasing power parity* dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen yang mempengaruhi IPM antara lain:

1. Derajat kesehatan dan panjangnya umur yang terbaca dari angka harapan hidup (*life expectancy rate*), parameter kesehatan dengan indikator angka harapan hidup, mengukur keadaan sehat dan berumur panjang.

2. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf rata-rata lamanya sekolah, parameter pendidikan dengan angka melek huruf dan lamanya sekolah, mengukur manusia yang cerdas, kreatif, terampil, dan bertaqwa.
3. Pendapatan yang diukur dengan daya beli masyarakat (*purchasing power parity*), parameter pendapatan dengan indikator daya beli masyarakat, mengukur manusia yang mandiri dan memiliki akses untuk layak.

Menurut Todaro (2006) pembangunan manusia ada tiga komponen universal sebagai tujuan utama meliputi:

1. *Kecukupan*, yaitu merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan. Jika satu saja tidak terpenuhi akan menyebabkan keterbelakangan absolut.
2. *Jati Diri*, yaitu merupakan komponen dari kehidupan yang serba lebih baik adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak mengejarsesuatu, dan seterusnya. Semuanya itu terangkum dalam *self esteem* (jati diri).
3. *Kebebasan dari Sikap Menghamba*, yaitu merupakan kemampuan untuk memiliki nilai universal yang tercantum dalam pembangunan manusia adalah kemerdekaan manusia. Kemerdekaan dan kebebasan di sini diartikan sebagai kemampuan berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh

pengejaran dari aspek-aspek materil dalam kehidupan. Dengan adanya kebebasan kita tidak hanya semata-mata dipilih tapi kitalah yang memilih

Tingkat pendidikan dan kesehatan individu penduduk merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk yang tinggi menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk itu sendiri yang semuanya bermuara pada aktivitas perekonomian yang maju

a. Pendidikan

Pendidikan nasional telah diatur dan didefinisikan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Muhibbin, 2006).

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*), sektor pendidikan memainkan peranan sangat strategis yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik. Analisis atas investasi dalam bidang pendidikan menyatu dalam pendekatan modal manusia.

Pendidikan memainkan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2004).

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran maksimal pada tingkat pendidikan dasar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pendidikan telah diyakini sebagai salah satu aspek pembangunan bangsa yang sangat penting untuk mewujudkan warga negara yang handal, profesional, dan berdaya saing tinggi. Pendidikan juga merupakan cara yang efektif sebagai proses nation and character building yang sangat menentukan perjalanan dan regenerasi suatu bangsa. Pendidikan anak sejak dini sangat penting untuk meningkatkan pembangunan politik, sosial, spiritual, emosi, dan intelektual anak yang perkembangannya sangat cepat dan merupakan dasar untuk pengembangan selanjutnya. Angka partisipasi murni dan rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengetahui capaian dari kinerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Angka partisipasi murni (APM) sebagai perbandingan antara proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah sesuai kelompok usianya. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Selanjutnya rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang

diikuti. Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan dasar hingga tingkat SLTP.

Untuk memperoleh pekerjaan yang ditawarkan di sektor modern didasarkan kepada tingkat pendidikan seseorang dan tingkat penghasilan yang dimiliki selama hidup berkorelasi positif terhadap tingkat pendidikannya. Tingkat penghasilan ini sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan (Todaro, 2000). Rata-rata lama sekolah merupakan indikator tingkat pendidikan di suatu daerah. Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (*human capital*) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

b. Kesehatan

Amartya Sen (dalam Todaro dan Smith, 2006), membantu memperjelas mengapa para ahli ekonomi pembangunan telah menempatkan penekanan yang begitu jelas terhadap kesehatan dan pendidikan, dan menyebut negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi tetapi memiliki standar pendidikan dan kesehatan yang rendah sebagai kasus "pertumbuhan tanpa pembangunan".

Beberapa ekonom beranggapan bahwa kesehatan merupakan fenomena ekonomi yang dapat dinilai dari stok maupun juga dinilai sebagai investasi, sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai suatu faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah

barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh individu, rumah tangga maupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan. Oleh sebab itu, kesehatan dianggap sebagai modal yang memiliki tingkat pengembalian yang positif baik untuk individu perorangan maupun untuk masyarakat luas. Mils dan Gilson (1990) dalam Anggit (2012) mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi pada sektor kesehatan, sehingga dengan demikian ekonomi kesehatan berkaitan erat dengan hal sebagai berikut:

- a) Alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan.
- b) Jumlah sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.
- c) Pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan.
- d) Efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya.
- e) Dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan pada individu dan masyarakat.

Juanita dalam Anggit (2012) menyatakan salah satu modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah kondisi kesehatan masyarakat yang baik. Di dalam pembangunan ekonomi juga harus diperhatikan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Keduanya ini harus berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan bagi semua yaitu kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan kesehatan yang dimaksud merupakan proses perubahan tingkat

kesehatan masyarakat dari tingkat yang kurang baik menjadi yang lebih baik sesuai dengan standar kesehatan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan merupakan pembangunan yang dilakukan sebagai investasi untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini, Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup menggambarkan umur rata-rata yang dicapai seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Untuk Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah menunjukkan pembangunan kesehatan belum berhasil, dan semakin tinggi AHH semakin menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah tersebut.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. AHH diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. AHH dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (indirect estimation). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup (AHH), yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP)

Indikator angka keluhan kesehatan ditunjukkan oleh banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan yang lalu. Untuk seseorang yang mengalami dua keluhan pada saat yang bersamaan dihitung satu untuk masing-masing keluhan.

2. Sumber Daya Alam

a. Sumber Daya Alam Sebagai Barang Publik

Barang publik (*public goods*) dalam banyak hal sangat dibutuhkan oleh masyarakat namun tidak seorang pun yang bersedia menghasilkannya. Kalaupun ada pihak swasta yang menyediakannya dan jumlahnya sudah tentu terbatas. Barang publik adalah barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, barang-barang publik disediakan oleh pemerintah karena sistem pasar gagal dalam menyediakan barang tersebut. Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang tertentu karena manfaat dari adanya barang tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi dinikmati oleh banyak orang.

Suatu jenis barang dinamakan barang publik, bila mengandung dua karakteristik utama, yaitu: (Mangkoesoebroto:2001)

a. Penggunaannya tidak bersaing (*non-rivalry*).

Satu orang dapat meningkatkan kepuasannya dari barang ini tanpa mengurangi kepuasan orang lain yang juga menikmatinya dalam waktu

bersamaan. Misalnya, jalan raya yang tidak padat lalu lintasnya, penggunaan oleh seseorang tidak akan mengurangi kenikmatan orang lain yang juga sedang memanfaatkannya pada saat bersamaan.

b. Tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian (*non-excludability*).

Bila barang publik sudah tersedia, maka setiap orang dapat memanfaatkannya tanpa ada pengecualian. Misalnya, dalam kasus prasarana jalan. Kecuali jalan tol, maka pemerintah tidak dapat mencegah setiap orang yang berniat menggunakan prasarana jalan yang sudah disediakan.

c. Walaupun setiap orang mengkonsumsi jumlah yang sama atas barang publik, tidak ada persyaratan bahwa konsumsi ini dinilai atau dihargai oleh semua orang.

Karena pihak swasta tidak mau menghasilkan barang publik, maka pemerintah yang harus menghasilkannya agar kesejahteraan seluruh masyarakat dapat ditingkatkan. Sebagai contoh ketika pihak swasta memproduksi mobil, maka otomatis yang diperlukan adalah tersedianya prasarana jalan raya yang dibangun oleh pemerintah. Kalau prasyarat ini tidak dipenuhi maka kesejahteraan masyarakat pun tidak mencapai titik optimal. Pada barang publik ini, seseorang tidak bersedia untuk menghasilkannya karena adanya masalah kepemilikan. Penyediaan barang-barang publik yang dilakukan oleh pemerintah seperti pertahanan nasional, jalan raya, kehakiman,

pekerjaan umum dan sebagainya dapat juga dihasilkan oleh perusahaan swasta tetapi dapat juga dihasilkan oleh perusahaan negara misalnya kereta api, jasa penerbangan. Jadi yang dimaksud dengan suatu barang publik yang disediakan oleh pemerintah merupakan barang milik pemerintah yang dibiayai melalui anggaran belanja negara tanpa melihat siapa yang melaksanakan pekerjaannya. Jalan raya negara pembiayaannya dilakukan melalui anggaran negara dan jalan tersebut dapat dikerjakan oleh pihak swasta atau oleh pemerintah sendiri.

b. Peranan Pemerintah dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam.

Dalam setiap sistem perekonomian, baik sistem perekonomian kapitalis atau system perekonomian sosialis pemerintah selalu mempunyai peranan yang penting. Peranan pemerintah sangat besar dalam sistem perekonomian sosialis dan sangat terbatas dalam sistem perekonomian kapitalis murni seperti dalam sistem kapitalis yang dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah mempunyai tiga fungsi pokok sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.
2. Menyelenggarakan peradilan.
3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta misalnya prasarana jalan, bendungan dan sebagainya.

Dapat dipahami bahwa dengan kemajuan-kemajuan dan perkembangan di setiap negara, tidak ada satu pun negara kapitalis di dunia ini yang melaksanakan sistem kapitalis murni. Dalam dunia modern, peranan pemerintah diharapkan mengatur jalannya perekonomian dan tidak sepenuhnya diatur oleh pihak swasta.

Adam Smith berpendapat bahwa dalam perekonomian kapitalis seseorang akan melakukan hal-hal yang dianggap terbaik bagi dirinya sendiri. Setiap individu akan melaksanakan aktivitas yang harmonis seakan-akan telah diatur oleh tangan gaib yang tak nampak (*invisible hand*). Karena itu, Adam Smith menyatakan lingkup aktivitas pemerintah sangat terbatas.

Prinsip kebebasan ekonomi ini dalam kenyataannya menghadapi berbagai benturan kepentingan, karena tidak adanya koordinasi yang harmonis di antara kepentingan masing-masing individu. Misalnya, kepentingan pengusaha sering bertentangan dengan kepentingan karyawan dan bahkan saling bertentangan.

Dalam hal ini, pemerintah mempunyai peranan dan wewenang untuk mengatur, memperbaiki atau mengarahkan aktivitas sektor swasta. Hal ini disebabkan oleh karena sektor swasta tidak dapat mengatasi masalah perekonomian, sehingga perekonomian tidak mungkin diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta.

Dalam perekonomian modern peran pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori berikut: (Mangkoesoebroto:2001)

1. Peran alokasi

Tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang publik (public goods) yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Barang swasta (private goods) adalah barang yang ketersediaannya dapat dipenuhi oleh sistem pasar. Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar disebabkan karena adanya kegagalan sistem pasar (market failure). Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang dan jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi dinikmati oleh orang lain. Contoh barang dan jasa yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar antara lain: prasarana jalan, pembersihan udara dan sebagainya.

Oleh karena itu, peranan pemerintah di sini adalah menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat dihasilkan oleh pihak swasta dan menjamin bahwa tujuan swasta tidak terhambat.

2. Peran distribusi

Peranan pemerintah di bidang alokasi sumber daya ekonomi adalah mengusahakannya agar alokasinya dilakukan secara efisien. Peran lain yang

perlu diupayakan pemerintah adalah menjadikannya sebagai alat distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan memperoleh pendapatan. Kemampuan memperoleh pendapatan bagi seseorang tergantung dari pendidikan, bakat sedangkan warisan tergantung dari hukum yang berlaku. Pemilikan faktor produksi sebagai sumber pendapatan tergantung dari permintaan akan faktor produksi dan jumlah yang ditawarkan oleh pemilik faktor produksi. Sementara permintaan dan penawaran faktor produksi akan menentukan harga dari faktor produksi yang bersangkutan dan akhirnya, pasar faktor produksi amat dipengaruhi oleh tingkat teknologi.

3. Peran stabilisasi

Selain peran alokasi dan distribusi, pemerintah mempunyai peranan utama sebagai stabilisator perekonomian. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta akan sangat peka terhadap goncangan-goncangan keadaan yang menimbulkan pengangguran dan inflasi.

c. Sumbangan Sumber Daya Alam Terhadap Pendapatan

Pendapatan merupakan gambaran untuk mengetahui pembangunan suatu bangsa dari tahun ke tahun. Dalam perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pada harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Apabila

menggunakan harga berlaku, maka nilai pendapatan nasional menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perubahan tersebut dikarenakan oleh penambahan barang dan jasa dalam perekonomian serta adanya kenaikan-kenaikan harga berlaku dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional berdasarkan harga tetap yakni perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu (tahun dasar) yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun berikutnya. Nilai pendapatan nasional yang diperoleh secara harga tetap ini dinamakan pendapatan nasional riil.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah daerah memperoleh proporsi dana bagi hasil sumber daya alam yang lebih besar dibanding dengan yang diatur melalui ketentuan perundang-undangan, Seperti yang ditegaskan dalam pasal 10 Undang undang No. 22 tahun 1999, pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya alam nasional yang tersedia di daerahnya.

3. Pengeluaran Publik Untuk Pendidikan dan Kesehatan

a. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Mengacu pada UU. No 20 Tahun 2003 dimana menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan

dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD. Negara-negara yang maju dapat dilihat dari tingginya tingkat pendidikan masyarakatnya karena tersedianya pelayanan pendidikan yang menunjang dan memadai. Peranan dominan pemerintah dalam pasar pendidikan tidak hanya mencerminkan masalah kepentingan pemerintah tetapi juga aspek ekonomi khusus yang dimiliki oleh sektor pendidikan, karena karakteristik yang ada pada sektor pendidikan yaitu sebagai berikut (Achsanah dalam Rica Amanda, 2010) :

1. Pengeluaran pendidikan sebagai investasi
2. Eksternalitas
3. Pengeluaran bidang pendidikan dan implikasinya terhadap kebijakan publik.
4. Rate of return pendidikan

b. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Beberapa ekonom menganggap bahwa kesehatan merupakan fenomena ekonomi, baik jika dinilai dari stok maupun sebagai investasi. Sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai baik oleh individu, rumah tangga maupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan

kesejahteraan. Oleh karena itu kesehatan dianggap sebagai modal dan memiliki tingkat pengembalian yang positif baik untuk individu maupun untuk masyarakat. Dana untuk kesehatan yang diatur pada UU No 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji, oleh karena itu sudah semestinya pemerintah harus dapat menyediakan pelayanan publik yang memadai dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan manusia.

4. Peranan Sumber Daya Alam terhadap Pembangunan Manusia

a. Teori Klasik

Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara yang menentukan output total yang dihasilkan menurut Smith adalah sumber daya alam yang tersedia atau tanah, sumber daya manusia, dan stok barang modal yang ada.

Menurut Smith, sumber daya alam merupakan unsur pokok dalam kegiatan produksi suatu masyarakat. Sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Jika sumber daya alam belum sepenuhnya digunakan, maka jumlah penduduk dan stok modal akan memegang peranan penting dalam pertumbuhan output. Sedangkan saat sumber daya alam yang tersedia tersebut telah habis digunakan maka pertumbuhan output akan berhenti. Sumber daya manusia

berperan pasif dalam pertumbuhan output karena jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Berbeda halnya dengan peran pasif dari sumber daya manusia, stok modal berperan aktif dalam pertumbuhan tingkat output karena jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal sampai batas maksimum sumberdaya alam (Arsyad, 1999).

Dalam pengertian Sumber daya Adam Smith Sumber daya merupakan komponen yang di perlukan untuk Aktivitas ekonomi secara matematis dapat di tulis sebagai :

$$Y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Dimana y adalah maksimum kuantitas dari output yang dihasilkan jika $x_1, x_2, \dots, x_n$ unit dari Output di gunakan secara optimal.

Secara Ekspilis, $f(x)$ misalnya, ditulis sebagai $f(K, R)$ dimana K adalah Stok Modal dan R adalah sumber daya alam.

b. Dasar Pemikiran Hotelling

Model Hotelling 1931 (dalam Geoferray : 2007) memberikan kerangka yang sederhana tentang sumber daya alam. Stok S_0 untuk sumber daya yang bisa habis (seperti minyak), konsumsi saat itu t adalah C_t , dan angka

penyusutan sumberdaya dijelaskan dengan sederhana dengan cara sebagai berikut :

Dikonsumsi atau $\frac{dS}{dt} = -C$, tergantung pada $S_t \geq 0$

Cara yang biasa untuk mengukur *net national product* (NNP) adalah konsumsi ditambah investasi. Tapi dalam kerangka ini, karena konsumsi sama dengan angka penyusutan, pendapatan bersih (konsumsi ditambah investasi) selalu didefinisikan nol. Rumusnya:

$$NPP = \frac{dS}{dt} + C = 0$$

Dalam perekonomian yang murni bergantung pada sumberdaya yang mudah habis, pendapatan dalam pengertian NNP selalu nol, walaupun kekayaannya positif. Dengan kata lain, tidak ada level positif *sustainable* untuk pengeluaran dalam kerangka ini. Ini menghasilkan pengertian intuitif: Perekonomian memiliki basis sumberdaya tetap (*fixed resource base*) yang hanya bisa diganti dengan satu jalan, yaitu langkah menurun. Jadi, kesejahteraan harus diturunkan apabila sumberdaya itu dikonsumsi.

Varian dari model Hotelling mengenai penyusutan sumber daya dalam perekonomian tertutup yang mengekstraksi sumberdaya dan kemudian menggunakannya dalam produksi dalam negeri. Ekstraksi sumberdaya mengarah pada pengeluaran dalam negeri yang bisa diinvestasikan.

Sehingga sumberdaya dapat, seperti dikemukakan pada bagian sebelumnya, ditransformasi ke dalam stok modal, kali ini melalui proses produksi dalam negeri. Memang, ekstraksi sumberdaya itu mahal: Tepatnya, $X(R)$ adalah biaya dari ekstraksi di *rate* R . Kita berasumsi bahwa X meningkat pada R .

Produksi dalam negeri bergantung pada input modal dan sumberdaya dan dijelaskan sebagai $Y = f(K, R)$, dimana stok modal, K , bergantung pada investasi I . Kali ini kita berusaha untuk memaksimalkan integral kesejahteraan dari konsumsi kondisional dengan batasan bahwa $\frac{dS}{dt} = R$ identitas penghitungan : $Y = C + I + X$, atau dengan ekuivalen :

$$I = f(K, R) - C - X(R)$$

Pengeluaran pemerintah untuk Pendidikan dan kesehatan sebagai Investasi maka dapat kita rumuskan secara matematis :

$$I = f(R) \dots\dots\dots(2.1)$$

Dimana :

I = Investasi Pendidikan dan Kesehatan

R = Sumber daya Alam

5. Natural Resources Curse (Kutukan Sumber Daya Alam)

Hipotesis kutukan sumberdaya alam (*Resources curse*) yang dikemukakan oleh (Auty 1993). Negara-negara yang berkelimpahan dengan sumberdaya alam seperti minyak dan gas, performa pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahannya (*good governance*) kerap lebih buruk dibandingkan negara-negara yang sumberdaya alamnya lebih kecil. Secara paradoks, meskipun muncul harapan besar akan munculnya kekayaan dan luasnya peluang yang mengiringi temuan dan ekstraksi minyak serta sumberdaya alam lainnya, anugerah seperti itu kerap kali menjadi penghambat daripada menciptakan pembangunan yang stabil dan berkelanjutan.

Kegagalan Negara-negara kaya sumber daya alam mencapai pertumbuhan yang ideal berkaitan erat dengan kemungkinan lemahnya perkembangan demokrasi (Ross 2001), korupsi (Salai-Martin and Subramanian 2003), dan perang saudara (Humphreys 2005).

Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan PBB memberi gambaran besarnya variasi kesejahteraan di semua negara kaya sumberdaya alam (Human Development Report 2013). Laporan ini menghimpun informasi tentang pendapatan, kesehatan, dan pendidikan di seluruh dunia. Dengan membaca laporan ini, kita bisa tahu bahwa Norwegia, sebuah negeri produsen minyak utama dunia, berada di posisi teratas dalam indeks tersebut. Negara-negara produsen minyak lain yang secara relatif berada di rangking teratas termasuk Brunei, Argentina, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Meksiko. Sementara, negara-negara yang menempati rangking paling rendah di dunia

adalah Equatorial Guinea, Gabon, Republik Kongo, Yaman, Nigeria, dan Angola.

Variasi efek kekayaan sumberdaya alam terhadap kesejahteraan tak hanya ditemukan di antara semua negara itu tapi juga di dalam negara masing-masing. Maka, meskipun peringkat negara-negara kaya sumberdaya alam itu cukup baik, tapi di dalam negeri sendiri mereka juga kerap diganggu oleh meningkatnya kesenjangan artinya negara-negara itu kaya tapi rakyatnya miskin. Hampir setengah dari penduduk Venezuela negara Amerika Latin yang memiliki sumberdaya alam paling besar hidup dalam kemiskinan yang berdasarkan sejarah, merupakan buah dari penguasaan sumber kekayaan oleh minoritas elit negeri itu (Weisbrot et. al., 2006).

Realitas ini juga memunculkan paradoks yang lain. Setidaknya dalam teori, sumberdaya alam bisa dipajaki tanpa menciptakan pengurangan insentif (*disincentives*) untuk investasi. Tidak seperti kasus aset-aset bergerak seperti modal, dimana pajak tinggi bisa mendorong keluarnya modal ke luar negeri minyak adalah komoditas yang tidak bergerak. Karena pajak yang dihasilkan dari penjualan minyak bisa digunakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih egaliter, maka setidaknya hasilnya diharapkan bisa memperkecil kesenjangan di negara-negara kaya sumberdaya alam, bukan justru memperbesarnya. Namun, realitasnya ternyata jarang terjadi. Efek berkebalikan dari sumberdaya alam terhadap ekonomi dan politik di negara

berkembang menimbulkan banyak pertanyaan sulit mengenai kebijakan pemerintah dan juga bagi komunitas internasional.

a. Penyebab Kutukan sumber daya alam

Munculnya perilaku pemburu rente (*rent seeking behavior*) terkait dengan sumber daya alam, kesenjangan yang biasa diistilahkan sebagai ekonomi rente timbul diantara nilai sumberdaya tersebut dan biaya ekstraksinya. Dimana individu-individu seperti para aktor sektor swasta atau para politisi, memiliki insentif untuk menggunakan mekanisme politik demi menanggung keuntungan. Kesempatan pun terbuka lebar bagi para pemburu rente, yakni kalangan korporasi dan maraknya kolusi dengan para pejabat pemerintahan, yang akibatnya memperparah persoalan ekonomi dan memperburuk konsekuensi politik terkait kekayaan sumberdaya alam. Faktor-faktor penyebab kutukan sumber daya alam antarlain sebagai berikut: (Macartan, et.al : 2007)

1. Keahlian yang tidak merata

Pemerintah akan menghadapi tantangan berat saat berurusan dengan korporasi internasional, yang memiliki kepentingan besar dan keahlian di sektor tersebut serta sumberdaya yang juga luar biasa besar. Karena eksplorasi migas bergantung pada modal dan teknologi (yang terus meningkat) sekaligus, maka ekstraksi migas membutuhkan kerja sama antara pemerintah negara bersangkutan dengan aktor-aktor sektor swasta internasional yang sudah berpengalaman. Dalam banyak kasus, ini bisa

menciptakan situasi ganjil dimana pembeli perusahaan minyak internasional sebenarnya tahu lebih banyak mengenai nilai barang yang dijual daripada penjualnya yakni pemerintah dari negara pemilik sumberdaya alam itu. Dalam perkara seperti itu, perusahaan internasional berada dalam posisi tawar yang sangat kuat dalam berhubungan dengan pemerintah.

2. Penyakit Belanda (*Dutch Disease*)

Pada 1970-an, Belanda mengalami peristiwa bahwa ledakan sumber daya akan mengalihkan sumber daya suatu Negara jauh dari kegiatan yang kondusif untuk pertumbuhan jangka panjang. Menyusul penemuan gas alam di Laut Utara, Belanda menyadari bahwa sektor manufaktur mereka tiba-tiba mulai berkinerja lebih buruk. Peningkatan mendadak nilai ekspor sumberdaya alam ternyata menghasilkan apresiasi terhadap nilai kurs riil. Pada gilirannya, ini membuat ekspor komoditas non-sumberdaya alam berada dalam posisi sulit dan kompetisi dengan impor beragam komoditas menjadi hampir mustahil (disebut sebagai “*spending effect*”). Sementara, valuta asing yang diperoleh dari hasil sumberdaya alam mungkin digunakan untuk membeli barang-barang perdagangan internasional, dengan mengorbankan banyak sektor manufaktur domestik yang memproduksi barang-barang tersebut. Secara bersamaan, sumberdaya dalam negeri seperti buruh dan material dipindahkan ke sektor sumberdaya alam (disebut juga sebagai “*resource pull effect*”). Konsekuensinya, harga

sumberdaya ini meningkat di pasar domestik, dan dengan demikian juga meningkatkan biaya bagi para produsen di sektor-sektor lainnya. Secara keseluruhan, ekstraksi sumberdaya alam telah menggerakkan sebuah dinamika yang memberikan keunggulan pada dua sektor domestik sektor sumberdaya alam dan sektor bukan perdagangan, seperti industri konstruksi dengan biaya memburuknya kinerja sektor-sektor ekspor tradisional.

3. Kerentanan gejolak (*Volatilitas*)

Perencanaan yang lebih berjangka panjang dipersulit oleh besarnya ketidakpastian pembiayaan di masa depan, terutama sebagai akibat fluktuasi nilai komoditas tersebut. Bahkan pada saat volatilitasnya tidak ada hubungannya dengan persoalan ketidakpastian, akibat ketidaksempurnaan pasar modal, maka volatilitas dalam penerimaan kerap kali diterjemahkan pula ke dalam volatilitas pengeluaran belanja. Hasilnya bisa berwujud pengeluaran yang tinggi sepanjang tahun-tahun yang bagus, yang sebaliknya lalu diikuti pemotongan yang tajam pada tahun-tahun yang tidak bagus. Ini pada gilirannya mengarah pada kondisi siklus pasang surut atau yang lebih dikenal dengan istilah “*boom-bust cycles*.” Sudah terlalu sering terjadi, periode berkelimpahan hanyalah bersifat sementara, mengingat banyaknya masalah yang juga bermunculan sepanjang periode minus yang tak begitu menggembirakan.

Besarnya fluktuasi ini bisa meningkat lagi karena pinjaman internasional. Saat periode bagus (harga dan produksi tinggi), negara meminjam uang dari luar negeri, sehingga semakin menggiatkan aktivitas ekonomi. Tapi ketika harga anjlok, lembaga atau negara pemberi pinjaman menuntut pembayaran kembali, sehingga memaksa pengurangan belanja negara yang lantas kian memperbesar keterpurukan.

B. Penelitian Sejenis

Tabel 5. Penelitian sejenis

No	Penulis, Tahun, dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil
1	Komarulzaman & Alisjahbana (2006), Testing the Natural Resource Curse Hypothesis in Indonesia: Evidence at the Regional Level	Data keuangan daerah dari kementerian keuangan digabungkan dengan data spesifik daerah dari BPS untuk mencari pola.	Regresi Cross-section	Hipotesis Kutukan sumber daya alam yang menjelaskan bahwa negara-negara yang berlimpah dengan sumber daya alam cenderung tumbuh lebih lambat dalam penelitian ini relevan untuk Indonesia.
2.	Adi Arta Kelana Putra (2013), Hipotesis Kutukan Sumber Daya Alam Dan Otonomi Daerah.	Indikator ketergantungan SDA yaitu rasio sektor SDA dan rasio bagi hasil SDA	estimasi System GMM	1. Hipotesis kutukan SDA tidak terbukti eksis di Indonesia. 2. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah hipotesis kutukan SDA tidak terbukti eksis, tetapi selama periode pelaksanaan otonomi daerah hipotesis kutukan SDA terbukti eksis meskipun lemah. 3. Pada pendekatan pergeseran sektoral, ketergantungan sektor SDA secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi 4. Ketergantungan sektor SDA memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan investasi baik pada periode sebelum otonomi daerah

				maupun selama periode otonomi daerah.
3	Jean Philippe Stijns (2006), Natural Resource Abundance and Human Capital Accumulation	Indikator umum digunakan kelimpahan sumber daya dan akumulasi modal manusia.	Pearson Korelasi	Kasus untuk bentuk kutukan sumber daya dalam akumulasi modal manusia tidak kuat untuk Perubahan yang wajar dalam indikator ini. Bahkan, kekayaan bawah tanah dan sumber daya sewa per kapita terbukti secara signifikan berkorelasi dengan indikator peningkatan akumulasi modal manusia.
4	Ian Coxhead (2007), A New Resource Curse? Impacts of China's Boom on Comparative Advantage and Resource Dependence in Southeast Asia	Eksplorasi Sumber Daya Alam dan Dimensi Kelembagaan	Korelasi	1. Negara-negara seperti Vietnam dan Indonesia, yang sektor industri yang kurang terdiversifikasi, akan menderita relatif lebih banyak daripada mereka seperti Malaysia, terutama mengingat kekuatan kedua di sektor teknologi tinggi. 2. "Kutukan sumber daya" hasil di Se Asia tergantung pada koeksistensi pergeseran dalam keunggulan komparatif dengan pasar atau institusional kegagalan yang merusak kemampuan untuk mengelola sumber daya alam untuk jangka panjang.
5	Dandi Yudha Feryawan (2011), Local Tax Effort and Accountability in the Resources-Rich Local Governments: Initial Evidences of Resources Curse in Indonesia.	Penarikan sampel daerah kaya dan daerah miskin SDA, indikator-indikator perekonomian.	Uji Beda daerah kaya sumberdaya alam dengan yang miskin sumberdaya alam.	1. Esai menemukan bahwa di pemerintah daerah yang diamati, ada pengaruh signifikan dari transfer pemerintah pusat dalam bentuk sumber daya alam bagi hasil untuk usaha pajak daerah. Hasil ini juga menunjukkan bahwa pemerintah lokal memilih untuk tidak mengoptimalkan sumber pendapatan daerah lain untuk mendapatkan transfer pemerintah pusat dalam jumlah yang lebih besar. 2. Kelemahan dalam akuntabilitas. Baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Sehingga banyaknya terjadi korupsi, penipuan, dan kegiatan illegal. Sehingga menunjukkan adanya eksistensi kutukan sumber daya alam.

Dari tabel diatas dapat kita lihat perbedaan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Komarulzaman & Alisjahbana (2006) dalam penelitiannya menggunakan bagi hasil (sewa) SDA sebagai ukuran kelimpahan SDA, dan menemukan bahwa secara agregat (total seluruh jenis sumber daya alam) kutukan sumber daya alam tidak terbukti eksis untuk kasus Indonesia.

Hasil penemuan penelitian yang dilakukan oleh Komarulzaman & Alisjahbana (2006) sejalan dengan Adi Arta Kelana Putra (2013) yang melakukan penelitian untuk menguji hipotesis kutukan sumber daya alam di Indonesia, terutama di era otonomi daerah. Studi ini menguji hipotesis kutukan sumber daya alam (SDA) dengan kerangka pendekatan pergeseran sektoral dan pendekatan kualitas institusi, untuk itu digunakan dua indikator ketergantungan SDA yaitu rasio sektor SDA dan rasio bagi hasil SDA.

Studi lainnya pada level daerah dilakukan oleh Feryawan (2011). Feryawan (2011) menguji hipotesis kutukan SDA dengan melakukan penarikan sampel untuk mewakili kategori daerah kaya dan daerah miskin SDA, kemudian membandingkan performa indikator-indikator perekonomian pada kedua kelompok sampel tersebut. Feryawan (2011) menunjukkan adanya bukti eksistensi kutukan SDA di Indonesia. Dari penelitian yang telah dilakukan terdapat perbedaan hasil temuan yang dilakukan oleh Feryawan (2011) dan Komarulzaman & Alisjahbana (2006) pada era otonomi daerah. Dengan adanya perbedaan temuan tersebut maka penelitian kutukan sumberdaya alam menarik untuk di teliti kembali. Perbedaanya penelitian ini menggunakan variabel

Kualitas Pembangunan manusia variabel Ketersediaan sumberdaya alam yang ada di daerah, hal ini karena kutukan sumberdaya alam relevan untuk dikaji pada era otonomi daerah, yang memberikan kekuasaan lebih besar bagi daerah untuk memanfaatkan sumber daya alamnya.

Dalam temuan Sachs and Warner (1995) dalam penelitiannya menemukan bahwa Banyak negara kaya sumberdaya alam justru masih berjuang supaya bisa lepas landas dan mengejar pertumbuhan ekonomi yang mandiri. Bahkan ada di antaranya yang terjerembab ke dalam krisis ekonomi yang parah. Di sejumlah negara, sumberdaya alam memang telah membantu meningkatkan standar kehidupan, tapi sekaligus gagal menciptakan pertumbuhan yang mandiri. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Sachs & Warner dilakukan pada tahun 1997 menemukan bahwa pada hakekatnya kelimpahan SDA (*resource abundance*) tidak melemahkan pertumbuhan ekonomi. Fenomena kutukan sumber daya alam terjadi ketika kelimpahan SDA tersebut identik dengan ketergantungan SDA (*resource dependence*).

Dalam penelitian yang di lakukan oleh Ian Coxhead (2007), menunjukkan bahwa untuk kasus Indonesia karena kurangnya sektor indutri yang terdiversifikasi dan juga faktor lembaga yang belum terlalu baik untuk pengelolaan sumber daya alam dalam jangka panjang sehingga penderitaan atau kutukan sumber daya alam akan lebih banyak jika dibandingkan dengan Negara-negara tetangga seperti Malaysia.

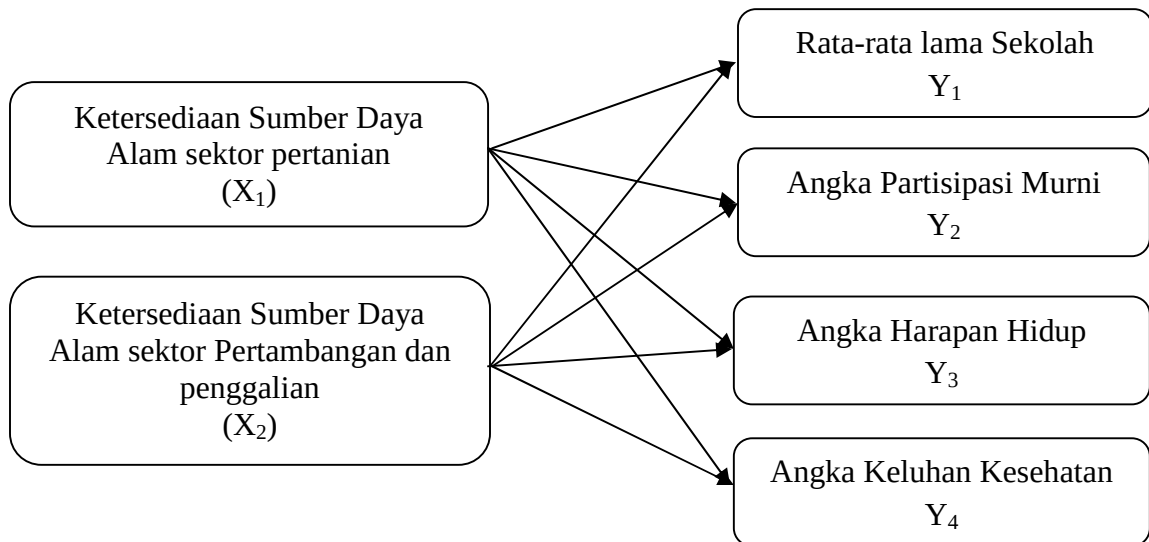
C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan, dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan teori yang telah dikemukakan dan rumusan masalah.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya penelitian ini menggunakan variabel sosial ekonomi yaitu: indikator-indikator pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat keberlimpahan sumber daya alam menggunakan persentase PDRB pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dan Sektor tambang dan galian terhadap PDRB.

Untuk lebih jelasnya, keterkaitan antara variabel tersebut akan terlihat dalam gambar berikut:



Ketersediaan sumber daya alam sektor pertanian merupakan sumber pendapatan daerah yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatnya perekonomian masyarakat maka akan semakin tinggi pendidikan formal yang ingin di capai oleh masyarakat tersebut.

Ketersediaan sumber daya alam sektor pertanian merupakan sumber pendapatan daerah yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, dengan meningkatnya perekonomian masyarakat maka akan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya pada semua jenjang pendidikan.

Ketersediaan sumber daya alam sektor pertanian merupakan sumber pendapatan daerah yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, dengan meningkatnya perekonomian masyarakat maka akan semakin tingginya pembangunan kesehatan yang ditandai dengan semakin lamanya tahun yang ditempuh selama hidup oleh masyarakat

Ketersediaan sumber daya alam sektor pertanian merupakan sumber pendapatan daerah yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatnya perekonomian masyarakat maka akan semakin tingginya pembangunan kesehatan yang ditandai dengan semakin rendahnya angka keluhan kesehatan.

Ketersediaan sumber daya alam sektor pertambangan dan penggalian merupakan sumber pendapatan daerah yang nantinya akan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatnya perekonomian masyarakat maka akan semakin tinggi pendidikan formal yang ingin dicapai oleh masyarakat tersebut.

Ketersediaan sumber daya alam sektor pertambangan dan penggalian merupakan sumber pendapatan daerah yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, dengan meningkatnya perekonomian masyarakat maka akan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya pada semua jenjang pendidikan.

Ketersediaan sumber daya alam sektor pertambangan dan penggalian merupakan sumber pendapatan daerah yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, dengan meningkatnya perekonomian masyarakat maka akan semakin tingginya pembangunan kesehatan yang ditandai dengan semakin lamanya tahun yang ditempuh selama hidup oleh masyarakat

Ketersediaan sumber daya alam sektor pertambangan dan penggalian merupakan sumber pendapatan daerah yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatnya perekonomian masyarakat maka akan semakin tingginya pembangunan kesehatan yang ditandai dengan semakin rendahnya angka keluhan kesehatan.

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat dikemukakan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini. Adapun hipotesis yang diajukan adalah :

1. Ketersediaan sumber daya alam sektor pertanian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendidikan.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Ketersediaan sumber daya alam sektor pertambangan dan penggalian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendidikan.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Ketersediaan sumber daya alam sektor pertanian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesehatan

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Ketersediaan sumber daya alam sektor pertambangan dan penggalian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesehatan

$$H_0 : \beta_4 = 0$$

$$H_a : \beta_4 \neq 0$$

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil olahan data dengan analisis regresi linier berganda dan pembahasan terhadap hasil penelitian, antara variabel bebas: persentase Sektor Sumber daya Alam pertanian terhadap PDRB, persentase Sektor Sumber daya Alam pertambangan dan penggalian terhadap PDRB terhadap variabel-variabel terikat: Rata-rata lama sekolah, Angka partisipasi murni, Angka harapan hidup dan angka keluhan kesehatan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil estimasi untuk hipotesis pertama, diketahui bahwa nilai t hitung angka harapan hidup lebih besar dari t tabel dan signifikan pada $\alpha = 0,05$. Dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan negatif persentase Sektor Sumber daya Alam pertanian terhadap PDRB terhadap rata-rata lama sekolah di Indonesia. Jika persentase Sektor Sumber daya Alam pertanian terhadap PDRB meningkat maka rata-rata lama sekolah akan turun.

Dari hasil estimasi faktor angka partisipasi murni, diketahui bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan signifikan pada $\alpha = 0,05$. Dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan negatif persentase Sektor Sumber daya Alam pertanian terhadap PDRB terhadap angka partisipasi murni di Indonesia. Jika persentase Sektor Sumber daya Alam

pertanian terhadap PDRB meningkat maka angka partisipasi murni sekolah akan turun.

2. Dari hasil estimasi untuk hipotesis kedua dengan sumber daya alam pertambangan dan penggalian, diketahui bahwa nilai t hitung angka harapan hidup lebih besar dari t tabel dan signifikan pada $\alpha = 0,05$. Dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan negatif persentase Sektor Sumber daya Alam pertambangan dan penggalian terhadap PDRB terhadap rata-rata lama sekolah di Indonesia. Jika persentase Sektor Sumber daya Alam pertambangan dan penggalian terhadap PDRB meningkat maka rata-rata lama sekolah akan turun

Dari hasil estimasi untuk hipotesis angka partisipasi murni diketahui bahwa nilai t hitung lebih kecil dari t tabel dan tidak signifikan pada $\alpha = 0,05$. Dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh persentase Sektor Sumber daya Alam pertambangan dan penggalian terhadap PDRB terhadap angka partisipasi murni di Indonesia. Jika persentase Sektor Sumber daya Alam pertanian terhadap PDRB meningkat maka tidak berdampak terhadap Angka partisipasi murni.

3. Dari hasil estimasi untuk hipotesis ketiga, diketahui bahwa nilai t hitung angka harapan hidup lebih besar dari t tabel dan signifikan pada $\alpha = 0,05$. Dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan negatif persentase Sektor Sumber daya Alam pertanian terhadap PDRB terhadap angka harapan hidup di Indonesia. Jika persentase Sektor Sumber

daya Alam pertanian terhadap PDRB meningkat maka angka harapan hidup akan turun.

4. Dari hasil estimasi untuk hipotesis keempat, diketahui bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan signifikan pada $\alpha = 0,10$. Dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan negatif persentase Sektor Sumber daya Alam pertambangan dan penggalian terhadap PDRB terhadap Angka harapan hidup di Indonesia. Jika persentase Sektor Sumber daya Alam pertambangan dan penggalian terhadap PDRB meningkat maka angka harapan hidup akan turun.
5. Setelah menganalisis dan menguji pengaruh ketersediaan sumber daya alam terhadap modal sosial dengan pengujian Hipotesis kutukan sumber daya alam, hasil analisis membuktikan bahwa hipotesis kutukan sumber daya alam terbukti benar di Indonesia.

B. SARAN

1. Peningkatan modal sosial perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan pembangunan dalam menunjang kemajuan suatu negara.
2. Untuk mencapai pembangunan modal sosial yang lebih baik maka peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama pemerintah di daerah-daerah.
3. Pemerataan peningkatan Infrastruktur di setiap daerah akan menunjang pembangunan seperti akses keterjangkauan pelayanan pendidikan dan

kesehatan akan mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan agar mampu menjadi pribadi yang kuat dan berdaya saing yang tinggi.

4. pemerintah harus mentata alur birokrasi dan suasana demokratisasi yang baik dan bersih maka akan tercipta perbaikan tataniaga untuk produk-produk SDA, menciptakan jejaring lembaga pendukung SDA dan peningkatan nilai tambah dari SDA.
5. Disarankan bagi peneliti yang lebih lanjut untuk meneliti lebih dalam mengenai indikator yang digunakan untuk melihat pengaruh sektor sumber daya alam pertanian dan penggalian terhadap kualitas penmbangunan manusia (pendidikan dan kesehatan) berupa angka kematian anak dan angka kematian balita untuk kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghio et al. 1999.” Inequality and Economic Growth: The Perspective of the New Growth Theories”. *Journal of Economic Literature*, Vol. 37, No. 4. (Dec., 1999), pp. 1615-1660.
- Amanda, Rica. 2010. “Analisis Efisiensi Teknis Bidang Pendidikan Dalam Implementasi Model Kota Layak Anak (Studi Kasus 14 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008)”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas di Ponegoro
- Auty. 2001. *Resource Abundance and Economic Development*. New York: Oxford University Press.
- Coxhead, Ian. 2007. “A New Resource Curse? Impacts of China’s Boom on Comparative Advantage and Resource Dependence in Southeast Asia”. *World Development* Vol.35, No.7, pp.1099-1119.
- Darumurti, Khrisna D. Umbu Rauta dan Daniel D. Kameo. 2003. *Otonomi Daerah Perkembangan pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fauzi, Akhmad. 2004. *Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan: teori dan aplikasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Feryawan, Dandy Yudha. 2011. “Assessing Natural Resources Curse Hypothesis at the Local Level in Indonesia”. *M.A. Thesis*. Rotterdam: Erasmus University.
- Gujarati, Damodar N. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta : Erlangga
- Gunawan, Sumodiningrat. 2003. *Pengantar Ekonometrika*. Yogyakarta : BPFE
- Gylfason, Thorvaldur. 2001. “Natural resources, education, and economic development. *European Economic Review* Tahun 2001, Nomor 45: 847-859
- Hakimudin, Dimas Rizal. 2010. “Analisis Efisiensi Belanja Kesehatan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2007”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas di Ponegoro
- Handra, Hefrizal dan Sri Maryati. 2009. “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bukan Pajak Pemerintah Propinsi Sumatra Barat”. *Konferensi Penelitian Keuangan Sektor Publik II Badan Litbang Departemen Dalam Negeri*.
- Humphreys, Macartan *et al.* 2006. *Escaping The Resource Curse*. New York : Columbia University Press